BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Bank Jabar.

Bank Jabar demikian sebutan untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat milik Pemerintah Jawa Barat. Pendiriannya dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 1960 tentang Peraturan Perusahaan di Indonesia milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu *N.V. Denis (De* Earshe *Nederlanshe Indische)* terkena ketentuan ini, dinasionalisasi dan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut Pemerintah Daerah Jawa Barat mendirikan PT. Bank Karta Pembangunan dengan Akta Notaris noezar No. 152 Tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 Tanggal 13 Mei 1961. Untuk pertama kali modal dasarnya Rp 2.500.000,00 , berasal dari kas Pemerintah Daerah. PT. Bank Karya Pembangunan kemudian disingkat BKP, kemudian menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No.7/ GKDH / BPD / 1961 tanggal 21 Mei 1961. Untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Daerah No.11 / PD-DPRD / 1972 tanggal 20 Juli 1972, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terhadap Peraturan Daerah yang merupakan Landasan Operasional dilakukan beberapa kali penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 1996, modal dasar Bank Jabar ditentukan sebesar Rp 250.000.000.000,00 .

Bank Jabar yang Kantor Pusatnya menempati gedung eks *N.V. Denis* terletak di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Naripan Bandung, satu-satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang peresmian pendiriannya dilakukan oleh Pj. Presiden RI , waktu itu Bapak Ir. H . Djuanda Kartawijaya

Aktivitas Bank Jabar sebagai Bank Umum, sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.28 /48 / KEP / DIR tanggal 22 November 1992. Disamping itu Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan " Bank Jabar " dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 1995 . Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan perekonomian dan perbankan, maka bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No.4 Tanggal 8 April 1999 dan Akta Disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada Tanggal 16 April 1999.

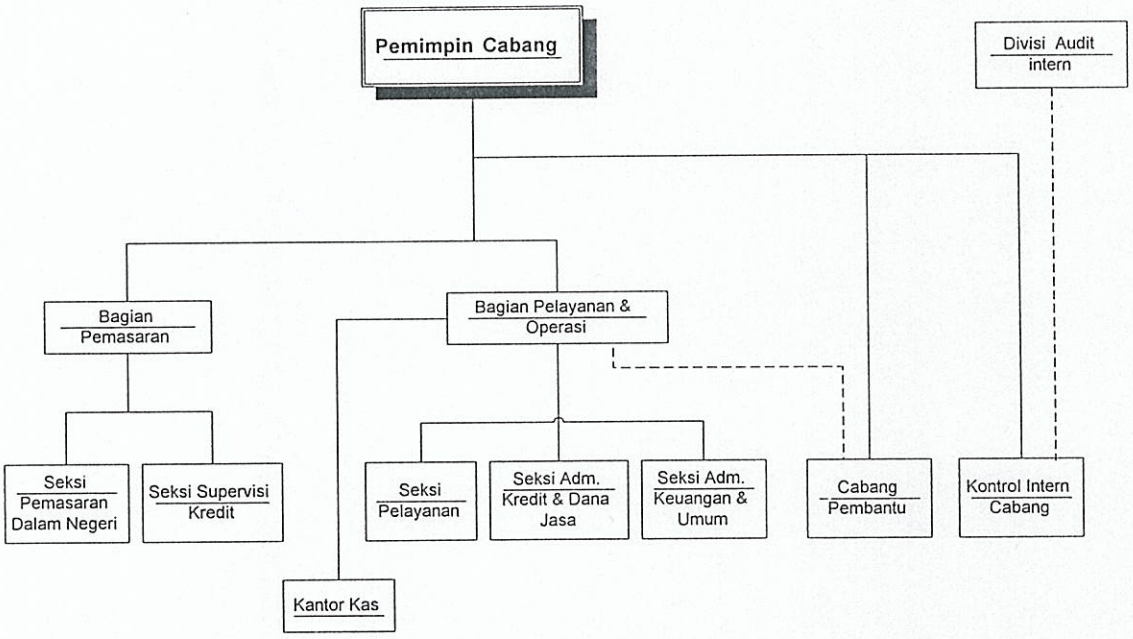
2.2. Struktur Organisasi Bank Jabar Cabang Soreang.

Struktur Organisasi Cabang berbeda tergantung kelasnya yaitu: untuk Cabang Utama terdiri dari Pimpinan, Wakil Pimpinan, Bagian dan Seksi , Cabang kelas I terdiri dari Pimpinan, Bagian dan Seksi , sedangkan Cabang kelas II terdiri dari Pimpinan dan Seksi.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BANK JABAR CABANG SOREANG

Kantor Cabang Kelas I Non Devisa



Sumber : Bank Jabar Cabang Soreang.

2.3. Deskripsi Jabatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Bank Jabar Cabang Soreang mencangkup diberbagai bagian / Deskripsi kerja diantaranya adalah:

1. Pimpinan Cabang

a) Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi segala kegiatan personil dan unit kerja kantor cabang pembantu, kantor kas dan mempertanggung jawabkan langsung kepada Direksi .

b) Melaksanakan seluruh wewenang yang diberikan oleh Direksi sebagai Wakil Direksi pada tingkat Kantor Cabang.

c) Bertanggung jawab atas kebenaran atas pencapaian sasaran dan akurasi dari laporan-laporan *Accounting Internal* maupun *Eksternal* serta bertanggung jawab atas pencapaian target yang harus dicapai oleh kantor cabang.

2. Kepala Seksi Perkreditan

a) Mengatur pelaksanaan tugas di Seksi Perkreditan.

b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas diunit perkreditan.

c) Pemeriksaan dan Legalisasi atas transaksi kredit.

3. Kepala Seksi Keuangan

a) Mengadakan pengawasan Internal diunit kerja Tabungan, Giro dan Deposito.

b) Melaksanakan / membantu tugas dan wewenang yang ada pada tabungan giro/deposito sesuai dengan fungsi yang diberikan.

c) Bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan setiap hari dan mengamankan uang fisik maupun uang giral dalam batas-batas tertentu untuk kelancaran operasional sehubungan dengan peraturan likuiditas.

4. Kepala Seksi Umum / Personalia / Akuntansi

a) Melaksanakan administrasi serta realisasi program evaluasi hasil kerja pegawai berdasarkan penilaian yang disampaikan unit kerja yang membawahi pegawai yang bersangkutan.

b) Melaksanakan Pembayaran-pembayaran atas biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional yang menjadi wewenang unit kerja personalia / umum.

c) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan dari pos-pos neraca harian dan lampirannya sesuai dengan buku pedoman dari Biro Administrasi Keuangan.

5. Kepala Seksi Customer Service

a) Bertanggung jawab atas pelayanan dan pembinaan nasabah dan bertanggung jawab atas peralatan investaris kantor.

b) Memberikan keterangan kepada calon nasabah yang akan membuka rekening baru di Bank Jabar Cabang Soreang.

6. Bagian Tabungan Dan Deposito

a) Menerima calon nasabah dan selanjutnya memeriksa data-data calon nasabah dan mendaftarkan ke Register.

b) Mengisi data-data ke rekening buku tabungan dan deposito.

c) Melayani setoran dan pengambilan tabungan, deposito dan pensiun.

d) Melegalisasi seluruh transaksi yang berhubungan dengan transaksi tabungan, deposito dan gaji sesuai kewenangannya

7. Bagian Kas Dan Kliring

a) Menerima setoran dan membayar pencairan cek, pencairan SPMU dan penyaluran biaya operasional atas dasar bukti-bukti dari bagian sekretaris.

b) Menerima setoran-setoran tunai dan non tunai dari bagian giro, kredit dan kas daerah.

c) Membuat jurnal bayar uang dan jurnal terima uang khusus transaksi bagian kas.

d) Menerima setoran kliring baik dari giro, tabungan dan kredit.

e) Menerima Jurnal Bayar Uang (JBU) dan Jurnal Terima Uang (JTU).

f) Administrasi kredit.

8. Bagian Giro

a) Menerima permohonan calon giro untuk pembukaan rekening.

b) Menerima warkat-warkat giro untuk diproses atau di validasi yang pelaksanaan pembayarannya diserahkan kepada bagian kas.

c) Membuat mutasi saldo giro.

d) Pengarsipan bukti-bukti transaksi giro.

e) Membuat nominatif giro.

f) Membuat Jurnal Terima Uang (JTU) dan Jurnal Bayar Uang (JBU) khusus transaksi giro.

9. **Bagian Transfer**

a) Pembukaan dan advis transfer uang.

b) Penerimaan kiriman uang.

c) Pengiriman berita kiriman uang.

d) Inkaso.

e) Pembuatan inkaso masuk.

f) Pengadministrasian.

g) Pembuat jurnal mutasi harian.

h) Pembuat dan pemeliharaan kartu prima nota.

10. Bagian Kas

a) Melayani dan memproses pencairan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang).

b) Membuat jurnal transaksi kas.

c) Membuat mutasi saldo kas.

d) Menjurnal penerimaan pajak.

e) Memproses dan mengadministrasi pajak.

f) Membuat pencatatan ke dalam buku besar.

g) Memfile jurnal dan bukti-bukti transaksi.

h) Membuat laporan pajak penerimaan KPKN.

11. Kantor Cabang Pembantu

a) Memimpin Kantor Cabang untuk dan atas nama Bank.

b) Mengatur dan mengawasi semua pekerjaan administrasi serta laporan di lingkungan Kantor Cabang.

c) Membina petugas dilingkungannya.

d) Mengurus atau melaksanakan administrasi dan keuangan Kantor Cabang Pembantu bersama-sama dengan pengawas lainnya.

e) Memproses permohonan kredit.

f) Membina dan menjalin hubungan dengan pihak luar

2.4. Aspek Kegiatan Bank Jabar

Adapun Rencana Pengembangan Aspek-aspek Penunjang Operasional PT. Bank Jabar adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- **Investasi**

  Investasi dalam pengembangan teknologi, perluasan jaringan kantor dan layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaannya yang didukung *analisis cost and benefit*. Pelaksanaan investasi disesuaikan dengan kemampuan pemupukan sumber dan investasi yang tersedia.

- **Manajemen Dan Kelembagaan**

  Pengembangan organisasi system dan prosedur dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta melakukan evaluasi terhadap ketentuan dan peraturan agar dapat mengikuti perkembangan perekonomian, ketentuan pemerintah di bidang perbankan serta kebijakan Otonomi Daerah.

  Perluasan jaringan kantor sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,

Kantor Kas, dan *Payment Point* dalam upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada nasabah.

Melaksanakan secara terus menerus riset dan pengembangan terhadap seluruh bidang operasional yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen.

- **Sumber Daya Manusia**

  Penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih professional melalui program rekruitmen dan program pendidikan serta latihan yang bermutu dan tepat, penerapan *Career Path Management* serta *Reward and Punishment.*

  Meningkatkan kesejahteraan karyawan berupa perbaikan skala gaji dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan, menetapkan strategi personalia untuk menghindari situasi *over staff* yang menyebabkan terjadinya tenaga kerja yang menganggur.

- **Pembinaan BPR Milik Daerah**

  Untuk memenuhi pelayanan jasa perbankan di pedesaan Jawa Barat telah didirikan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Pendirian BKPD tersebut merupakan gagasan Bapak Mashudi yang direalisasikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat Nomor 40/ BI/ Pem/ SK/ 65 tanggal 21 Desember 1965. Jumlah BKPD yang dibentuk sebanyak 225 unit yang tersebar di Kecamatan-kecamatan pada 13 Kabupaten, di mana 217 unit mendapat izin usaha perbankan dari Menteri Keuangan.

Pembinaan terhadap BKPD dilakukan oleh Badan Pembina termasuk Bank Jabar sebagai anggota, untuk pemeriksaan intern BKPD di Kabupaten masing-masing ditangani oleh Inspektur BKPD yang Pejabatnya dari Bank Jabar. Tugas tersebut berlangsung hingga tahun 1973 dan selanjutnya diserahkan kepada Inspektur BKPD yang Pejabatnya dari Pemerintah Daerah.

Sementara BKPD belum terbentuk di seluruh Kecamatan Jawa Barat, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.331/ MK/ IV/ B/ 70 tentang larangan mendirikan bank desa yang baru, sedangkan eksistensi lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah.

Untuk keperluan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/ 26/ UPPB/ PPTR yang membolehkan pendirian Lembaga Keuangan Pedesaan dengan tidak menyebutkan nama Bank. Berpedoman pada surat dimaksud, dibentuklah Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) yaitu untuk wilayah Banten melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 171/A-V/18/SK/1972, wilayah Cianjur dengan Surat keputusan Gubernur Nomor 142/A.II/5/SK/1973 dan untuk daerah lainnya melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 446/A.III/SK/1973, sehingga terbentuk sebanyak 161 unit tersebar di Kecamatan-kacamatan 18 Kabupaten.

Dalam upaya pengembangan BKPD/LPK, Bank Jabar sering kali mendapat kepercayaan menangani berbagai program dari Pemerintah, yaitu *Proyek Provincial of Area Development Program*,

Proyek Kredit Usaha Tani DAS Citanduy, *Financial Institutions Development Project*, Kredit Usaha Kecil, Kredit Dana Bergulir, Kredit Mikro termasuk pelatihan para pengelola BKPD/LPK.

Pengaturan LPK kerap kali terjadi perubahan,terakhir disempurnakan melalui Peraturan Daerah Propinsi Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 13 Desember 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) yaitu mengatur 62 LPK yang menjadi BPR, dan 82 LPK lainnya.

Peranan Bank Jabar pada PD. PK ialah memberikan Penyertaan Modal kepada PD. BPR LPK sebesar 15% bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi 35% dan Pemerintah Kabupaten 50%, melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah/Instansi lain dalam rangka mengoptimalkan fungsi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Daerah.

Realisasi Penyertaan Modal kepada PD. BPR LPK sampai dengan tahun 2000 sebesar Rp 9,726 miliar, yaitu dari Pemerintah Propinsi Rp 4, 748 miliar (49%), Pemerintah Kabupaten Rp 3,538 miliar (36%) dan Bank Jabar sebesar Rp 1,440 miliar (15%).

Dengan adanya 87 BPR di Jawa Barat terkena BBKU yaitu 3 PT. BPR dan 84 PD. BPR eks BKPD/BPS, sesuai Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/166/KEP/DIR, Bank Jabar mendapat kepercayaan sebagai Bank

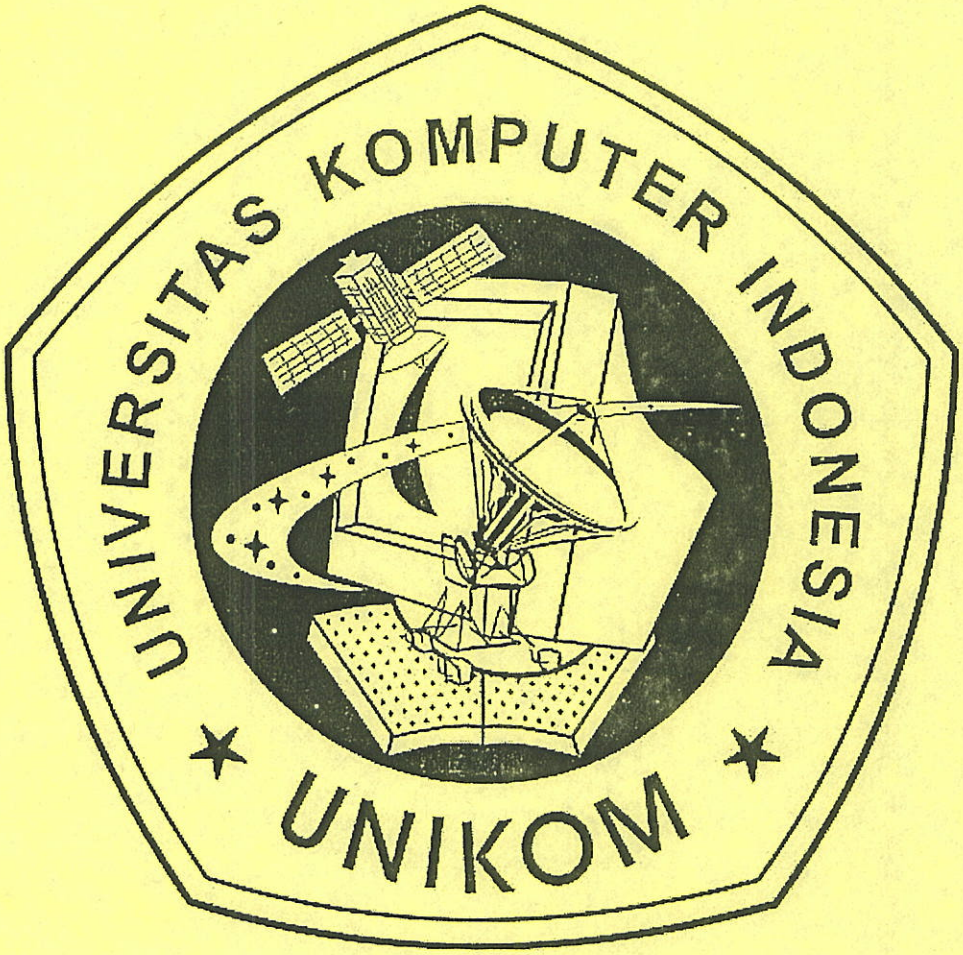
Pembayar atas kewajiban 87 BPR-BBKU, yaitu dibayarkan dana talangan Pemerintah sekitar Rp 37,8 miliar.

Tugas-tugas yang berhubungan antara Bank Jabar dengan BPR milik Daerah sejak pendiriannya terus berkelanjutan, hal tersebut telah memberikan pengalaman yang berharga khususnya dalam upaya membantu mewujudkan kemandirian usaha Lembaga Keuangan Pedesaan tersebut agar dapat mendorong pertumbuhan pembangunan daerah serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi daerah.

- **Kegiatan Sosial**

Setiap Tahun Bank Jabar senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat social untuk mengurangi beban yang harus dipikul oleh masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan social Bank Jabar dilakukan baik langsung maupun bekerjasama dengan Kumpulan Istri Bank Jabar (KIBAR) berupa pemberian bantuan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan Pembagian Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) kepada masyarakat yang kurang mampu, yang dilakukan baik dalam rangka memperingati hari bersejarah maupun pada waktu-waktu tertentu.

Selain itu pada tahun 2000 Bank Jabar telah membangun Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi dan pada tahun 2001 di Kabupaten Pandeglang. Bank Jabar membangun kedua Sekolah Dasar tersebut untuk mengganti bangunan sekolah yang rusak akibat bencana alam.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM